

PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  
KPP Pratama Sidoarjo Utara)

USULAN PENELITIAN

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Untuk Menyusun Skripsi S-1 Program Studi Akuntansi

Oleh :

ERIK HENDRA WIBISONO

0813010062/FE/EA

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR  
2013

PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  
KPP Pratama Sidoarjo Utara)

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Diajukan Oleh :

ERIK HENDRA WIBISONO

0813010062/FE/EA

Kepada

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2013

## SKRIPSI

### PENGARUH PENGALAMAN, MOTIVASI, DAN MENTAL KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KEBERHASILAN INDUSTRI SANDAL DAN SEPATU DI WEDORO

Disusun Oleh :

Erik Hendra Wibisono  
0813010062/FE/EA

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh  
Tim Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 13 Juni 2013

Pembimbing Utama

Tim Penguji  
Ketua

Dra.Ec. Siti Sundari, MSi

Drs.Ec. Muslimin, MSi

Sekretaris

Dra.Ec. Siti Sundari, MSi

Anggota

Drs.Ec. Eko Riadi, MAks

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur

Dr. H.R.Dhani Ichsanuddin Nur, SE.MM  
NIP. 19630924 198903 1001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT pengatur semesta alam, yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta melimpahkan segala rahmat hidayah dan karuniaNya serta kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sidoarjo Utara)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam penyusunan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto,MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak DR. Dhani Ichsanuddin Nur,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. RA Suwaidi,Msi selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Dr. Hero Priono, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Progdi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dra. Ec. Siti Sundari, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

6. Seluruh pengusaha industri kecil sandal dan sepatu di Wedoro yang telah membantu peneliti dalam penyusunan sripsi ini..
7. Segenap Staf Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan berharga.
8. Kepada Keluargaku, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas segala doa, bimbingan, kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada hentinya.
9. Serta pihak-pihak lain yang ikut membantu dalam pengerjaan skripsi ini yang namanya tidak saya sebutkan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Surabaya, 21 Mei 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Lampiran .....	ix
Abstraksi .....	x
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori.....	13
2.2.1. Pajak.....	13
2.2.1.1. Pengertian.....	13
2.2.1.2. Fungsi Pajak.....	16
2.2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.2.1.4. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak....	20
2.2.1.5. Pengelompokan Pajak.....	22
2.2.1.6. Hambatan Pemungutan Pajak.....	24
2.2.2. Pajak Penghasilan (PPH).....	25

2.2.2.1. Pengertian PPh.....	25
2.2.2.2. Subyek dan Bukan Subyek PPh.....	26
2.2.2.3. Obyek dan Bukan Obyek PPh.....	28
2.2.2.4. Tarif Pajak.....	31
2.2.3. Pemahaman Self Assessment System.....	31
2.2.3.1. Kesadaran Wajib Pajak.....	33
2.2.3.2. Kejujuran Wajib Pajak.....	34
2.2.3.3. Hasrat Membayar Pajak.....	34
2.2.3.4. Kedisiplinan Wajib Pajak.....	35
2.2.4. Penghindaran Pajak.....	36
2.2.5. Pengaruh Kesadaran WP Terhadap Penghindaran Pajak.....	38
2.2.6. Pengaruh Kejujuran WP Terhadap Penghindaran Pajak.....	39
2.2.7. Pengaruh Hasrat Membayar Pajak Terhadap Penghindaran Pajak.....	41
2.2.8. Pengaruh Kedisiplinan WP Terhadap Penghindaran Pajak.....	41
2.3. Kerangka Pikir.....	43
2.4. Hipotesis.....	43
<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	44
3.1.1. Definisi Operasional Variabel.....	44

3.1.2. Pengukuran Variabel.....	45
3.2. Teknik Pengambilan Sampel.....	47
3.2.1. Populasi.....	47
3.2.2. Sampel.....	47
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.3.1. Jenis Data.....	48
3.3.2. Pengumpulan Data.....	48
3.4. Uji Kualitas Data.....	50
3.4.1. Uji Validitas.....	50
3.4.2. Uji Reabilitas.....	50
3.4.3. Uji Normalitas.....	51
3.5. Uji Asumsi Klasik.....	51
3.5.1. Regresi Linier Berganda.....	53
3.6. Uji Hipotesis.....	54

#### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....	58
4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Sidoarjo Utara .....	58
4.1.2. Lokasi Kantor.....	59
4.1.3. Wilayah Kerja.....	59
4.1.4. Struktur Organisasi KPP Pratama.....	60
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	63
4.2.1. Kesadaran Wajib Pajak.....	63
4.2.2. Kejujuran Wajib Pajak.....	63



4.2.3. Hasrat Membayar Pajak.....	64
4.2.4. Kedisiplinan Wajib Pajak.....	65
4.2.5. Penghindaran Pajak.....	66
4.3. Uji Kualitas Data.....	67
4.3.1. Uji Validitas.....	67
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	70
4.3.3. Uji Normalitas.....	71
4.4. Uji Asumsi Klasik.....	72
4.4.1. Uji Multikolinearitas.....	72
4.4.2. Uji Heterokedastisitas.....	74
4.5. Analisis Regresi Linear Berganda.....	75
4.6. Uji Hipotesis dan Pembahasan.....	78
4.6.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	78
4.6.2. Uji Signifikan Parameter Individual(uji stat.t) ...	80
4.7. Pembahasan Hasil Penelitian.....	83
4.8. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan sekarang.....	84
4.9. Keterbatasan Penelitian.....	86
 BAB V Kesimpulan dan Saran	
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran.....	88
Daftar Pustaka.....	89
 Lampiran	

**PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN  
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  
KPP Pratama Sidoarjo Utara)**

Oleh :

Erik Hendra Wibisono

**Abstrak**

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat adalah pajak penghasilan. Saat ini sistem perpajakan di Indonesia adalah Self Assessment System yaitu wajib pajak sebagai subyek pajak di dalam menentukan kewajiban perpajakannya diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan. Dalam penerapan Self Assessment System ini wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan hasrat yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan penghindaran pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Teknik Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 97 Wajib Pajak Pribadi. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa hanya Hasrat Membayar Pajak yang mempunyai kontribusi terhadap penghindaran pajak, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak tidak mempunyai kontribusi terhadap penghindaran pajak.

**Keyword :** Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Hasrat Membayar Pajak, Kedisiplinan Wajib Pajak, dan Penghindaran Pajak Penghasilan.

EFFECT OF APPLICATION SELF ASSESSMENT SYSTEM  
TO TAX AVOIDANCE OF INCOME TRENDS  
(Personal Case Study taxpayer In KPP  
Pratama Sidoarjo Utara)

By :

Erik Hendra Wibisono

Abstract

In the effort to defray development, governmental have intended slowly discharge depended from outside country and transfer to ability of nation alone the make-up of acceptance of state from tax sector. One of the tax type collected by government from society is income tax. In this time taxation system in Indonesia is Self Assessment System that is taxpayer as tax subject in determining obligation taxation given by trust to count, to paying, and reporting by self the amount of lease which debt, as according to regulation of taxation going into effect. But in this system still found by the existence of gap to taxpayer to conduct tax avoidance. This matter is caused by for example not yet enough it knowledge of taxation, awareness of taxpayer to pay for and tax sincerity of taxpayer in reporting calculation of income tax truly and complete. Lower mount knowledge of taxation of society about tax result society attitude tend to apathetic to tax which finally have an effect on to society behavior in the case of discipline pay for tax. This research aim to effect of application self assessment system to tax avoidance of income trends. In applying of this Self Assessment System of taxpayer expected to have awareness, sincerity, high ambition and discipline in fulfilling obligation perpajakan him/it and not conduct tax avoidance.

Population in this research are personal tax payer people of Desa Kepuh Kiriman, District of Waru, Sub-Province Sidoarjo which enlist in KPP Pratama Sidoarjo Utara. Sample research taken by simple sampling random Amount of used by sample are 97 Personal Taxpayer.. Analysis Technic use doubled linear regression analysis with hypothesis test use simultans significance test (statistical f tes) and partial test (t test).

Based on result of analysis found that only Ambition Pay for tax having contribution to tax avoidance, while Awareness of Taxpayer, Sincerity of Taxpayer, and Dicipline Taxpayer don't have contribution to tax avoidance.

Keyword : Awareness Taxpayer, Taxpayer Honesty, Passion Paying Taxes, Tax Disciplinary and Income Taxation.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Di Indonesia sendiri sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku, pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan tingkat penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan layanan prima kepada wajib pajak (Rapina, 2011).

Kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional yaitu dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan reformasi perpajakan (tax reform) tahun 1983 yang dimulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 yang telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000 dari official assessment system menjadi self assessment system. Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi perpajakan adalah agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

Kebijakan ini pada hakikatnya merupakan suatu langkah perubahan yang mendasar antara lain menyangkut masalah sistem pemungutan, sistem sanksi, kemudahan dan kepastian hukum. Melalui kebijakan baru di bidang perpajakan diharapkan adanya penyesuaian sikap, baik dari wajib pajak maupun aparat pajak, khususnya dalam rangka menjalankan self assessment system. Fungsi dan peranan dari wajib pajak ditingkatkan, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada wajib pajak sendiri (Indawati, 2007:37).

Fungsi perhitungan memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi perhitungan wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sejalan dengan kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan peran aparat pajak untuk memperlancar pelaksanaan self assessment system.

Fungsi aparaturn pajak dalam self assessment system ditekankan pada tiga hal, yaitu pembinaan yang dilakukan melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan dan pengawasan.

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat akan pemahaman self assessment system secara murni. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Ironisnya, banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti arti pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal pajak adalah salah satu hal terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu negara dan kesejahteraan warganya (Soemitro, 1991:89).

Keuntungan self assessment system ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Kusumawati dan Tarjo, 2006).

Sementara itu, fenomena yang terjadi sekarang perkembangan jumlah WP semakin meningkat. Padahal jika dilihat dari teori yang ada, kebanyakan dari masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya yaitu kewajiban sebagai Wajib Pajak. Bahkan yang terjadi, sebagian dari mereka berusaha untuk menghindari dari pajak, baik itu perlakuan yang pasif sampai dengan perlakuan yang aktif.

Salah satu cara untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT secara benar dan tepat maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Kepuh Kiriman, dimana peneliti menggunakan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun selalu meningkat. Terbukti dari tahun 2009

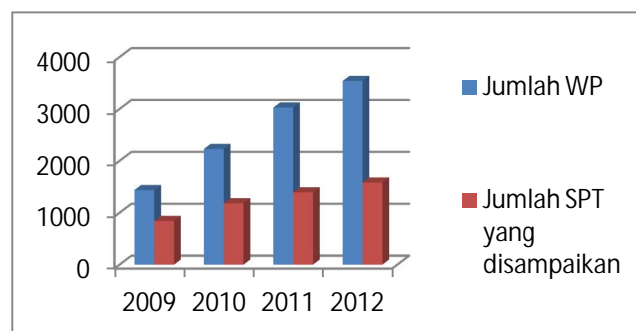
sampai dengan tahun 2012, jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya terus meningkat tetapi jumlah prosentase antara jumlah SPT yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun selalu menurun, seperti yang tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 : Perkembangan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan

No.	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah SPT yang disampaikan	Prosentase %
1	2009	1438	841	58%
2	2010	2229	1183	53%
3	2011	3027	1394	46%
4	2012	3540	1583	44%

Sumber : KPP Sidoarjo Utara

Grafik Perkembangan Jumlah Wajib Pajak dan SPT Yang Disampaikan



Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak semakin meningkat setiap tahunnya. Dimana jumlah wajib pajak pada tahun 2009 sebanyak 1438 orang dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3540 orang. Begitu juga jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan.



Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment System, dimana kegiatan penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban yang termasuk didalamnya. Dalam penerapan Self Assessment System ini wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan hasrat yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan pada kenyataannya kesadaran wajib pajak masih kurang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan dan menyampaikan SPT tahunan. Meskipun dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak meningkat tetapi tidak sama dengan peningkatan penyampaian SPT setiap tahunnya hal ini dapat dilihat berdasarkan prosentase perkembangan yang terjadi selalu menurun (berdasarkan tabel 1).

Banyak indikasi yang menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan SPT-nya, salah satunya adalah penghindaran pajak. Hal ini terkait dengan kesengajaan wajib pajak dalam penyampaian SPT yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dimengerti karena dengan alasan bahwa hasil pembayaran pajak kurang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum sebagai wajib pajak. Sehingga menimbulkan suatu kecenderungan perilaku penghindaran pajak.

Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administrasi maupun hukuman pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau melakukan praktek penghindaran pajak, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak alasan yang membuat wajib pajak melakukan penghindaran pajak, antara lain wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban

perpajakannya, tidak memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, tingginya tarif pajak dan ketidakstabilan pemerintah dalam hal penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak. Tetapi dalam kondisi sekarang ini diakui bahwa sejumlah wajib pajak yang berpendidikan, dan karena memahami dan menguasai betul undang-undang dan perpajakan, berusaha melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) yakni berupaya meringankan pajak dengan menggunakan peluang atau celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (Nurmantu,2003).

Berdasarkan self assessment system, semua wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga diwajibkan untuk mengisi SPT Masa maupun Tahunan dengan benar, lengkap dan jujur. Namun dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul:

**“PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN**

**( Study Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sidoarjo  
Utara )”.**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kecenderungan penghindaran wajib pajak?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk membuktikan dan menguji secara empirik adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak terhadap kecenderungan penghindaran pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang sistem yang berlaku di Indonesia yaitu Self Assessment System.

## 2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh self assessment system terhadap kecenderungan penghindaran pajak penghasilan.

## 3. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk lebih mengetahui dan bisa menerapkan self assessment system dalam kewajiban membayar pajaknya agar tidak terjadi penghindaran pembayaran pajak.

## 4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Memberikan masukan kepada kantor pelayanan pajak tentang pentingnya pemahaman self assessment system yang harus diberikan kepada masyarakat selaku wajib pajak.